

ABSTRAK

Muhammad Dimas Al Fikri, NIM 126103202157, Perspektif Asas Kemandirian Pada Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Progam Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perspektif Kemandirian dan Penggunaan Dana Desa.*

Penelitian ini dilatarbelakangi pada eksistensi perspektif kemandirian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Angka 2 huruf b ayat 9 Penjelasan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri diatur juga dalam Pasal 3 huruf i Kemandirian UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwasanya dalam pengimplementasian kemandirian dalam penggunaan dana desa pada pembangunan belum stabil atau belum merata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar desa Murukan yang terbatasnya kemampuan dalam hal pengelolaan dana desa yang setiap desa berbeda dalam penurunan dana desa setiap satu tahun sekali, padahal setiap tahun bertambahnya penduduk desa. Akibatnya setiap jalan dan penerangan jalan belum merata akibat kurangnya dalam pendanaan, yang seharusnya pemerintahan desa Murukan harus mandiri dalam pengimplementasian akan tetapi belum mampu dikatakan dalam kemandirian sesuai realita yang diamanatkan UU Desa untuk hal kemandirian Pasal 3 huruf i UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebab perlunya dalam hal kemandirian menurut pendapat Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat (*invisible hand*), yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah¹, yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dan Menurut Barnadib kemandirian meliputi ‘prilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat ini diperkuat oleh Kartini dan Dali yang mengatakan bahwa, kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri dan kemandirian merupakan kemampuan tanpa campur tangan pihak lain seharusnya pemerintahan desa Murukan harus bisa mandiri sebab tanpa adanya campur tangan dari pemerintah untuk mengatur kemandirian kesejahteraan masyarakat desa Murukan, sebab dalam pengelolaan keuangan masih kebingungan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dimana uang tersebut belum terlaksana secara mandiri dalam pembangunan merata sesuai amanat Pasal 3 huruf

¹ Ketika APBN Membantah “The Invisible Hand”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13300/Ketika-APBN-Membantah-The-Invisible-Hand.html#:~:text=Adam%20Smith%20mengemukakan%20teori%20bahwa,salah%20satu%20fo ndasi%20dalam%20ideologi> diakses pada tanggal 23 April 2024.

i UU Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itulah penulis merumuskan dalam penelitian dibawah ini:

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penggunaan Dana Desa Dalam Perwujudan Kemandirian di Desa Murukan? 2) Bagaimana Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan di Desa Murukan 3) Bagaimana Perspektif Asas Kemandirian Dalam Penggunaan Dana Desa?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penggunaan dana desa dalam perwujudan kemandirian di desa Murukan? 2) Bagaimana penggunaan dana desa pada pembangunan di desa Murukan 3) Bagaimana Perspektif Asas Kemandirian Dalam Penggunaan Dana Desa?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan dana desa pengimplementasian kemandirian di desa Murukan yaitu kurangnya dalam hal pendanaan desa Murukan, yang dimana dalam 1 tahun harus menunggu lama turunnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbatasnya dalam pengelolaan kemampuan dalam hal pengelolaan dana desa yang semakin padat penduduk masyarakat desa Murukan dan vakumnya BUMDesa dimana seharusnya kemandirian sudah bisa mengatur dan mengelola atau mengembakan keuangannya masih belum mampu dalam pengelolaan keuangan secara mandiri sebagaimana pendapat Kartini dan Dali yang mengatakann bahwa, kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri dan kemandirian merupakan kemampuan tanpa campur tangan pihak lain. 2) Pembangunan desa Murukan belum merata 100% sebab kurangnya dana desa dan masih terbatasnya dalam mengelola keuangan dana desa, yang sebagaimana jalan dan penerangan lampu belum ada setiap desa namun dalam hal pembangunan lain seperti TPQ, Madrasah desa Murukan sudah mampu dalam hal mengelola dalam bertahap. 3) Dalam perspektif di desa Murukan asas kemandirian dalam mengelola praktik penggunaan dan desa, masih banyak sekali aparatur pemerintahan desa termasuk kepala desa Murukan sendiri yang menyampaikan bahwasanya kurangnya dalam pendanaan hal ini menghambat kemandirian desa dalam hal pembangunan. Dalam artian masih belum bisa dikatakan mandiri, sebagaimana penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 kemandirian yaitu suatu proses proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri dalam artian desa Murukan belum mampu dalam hal pengelolaan penguanaan desa dalam pembangunan yang merata. Sebab mandiri ialah mandiri tanpa bantuan pihak lain, bisa mengembangkan keuangan dana desa, sebab pendapatan asli desa bisa didapatkan melalui BUMDesa diatur dalam Angka 18 Pasal 72 ayat 1 huruf a Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Abstract

Muhammad Dimas Al Fikri, NIM 126103202157, Embodiment of the Principle of Independence in the Use of Village Funds (Study of Murukan Village, Mojoagung District, Jombang Regency), Thesis, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. Dian Ferricha, SH, M.H.

Keywords: *Perspective on Independence and Use of Village Funds.*

This research is motivated by the existence of an independence perspective in Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Number 2 letter b paragraph 9 of the Explanation of Law Number 6 of 2014 which emphasizes independence, namely a process carried out by the Village Government and the community. village to carry out an activity in order to meet their needs with their own abilities is also regulated in Article 3 letter i Independence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. That in implementing independence in the use of village funds for development, it is not yet stable or evenly distributed, which is felt by the community around Murukan village, which is limited ability in terms of managing village funds, where each village is different in that village funds decrease once a year, even though the village population increases every year. As a result, every road and street lighting is not evenly distributed due to a lack of funding. The Murukan village government should be independent in implementing it, but it has not been able to say it is independent in accordance with the reality mandated by the Village Law regarding independence, Article 3 letter i of Law Number 6 of 2014. Because of the need In terms of independence, according to Adam Smith, he put forward the theory that the mechanism for achieving a level of prosperity can be achieved through the power of the invisible hand, namely without any government interference, which, as stated by Adam Smith and according to Barnadib, independence includes 'behavior that is able to take initiative, be able to overcome obstacles/problems, have self-confidence and can do things on their own without the help of others. This opinion is reinforced by Kartini and Dali who say that, independence is the desire to do everything for oneself and independence is the ability without interference from other parties, the Murukan village government should be able to be independent because without any interference from the government to regulate the independence of the welfare of the village community. Murukan, because in financial management there is still confusion in the financial management of village funds where the money has not been implemented independently in equitable development in accordance with the mandate of Article 3 letter i of Law Number 6 of 2014. That is why the author formulates in the research below:

The formulation in this research is: 1) How are Village Funds Used in the Perspective of Independence in Murukan Village? 2) How are Village Funds Used in Development in Murukan Village? 3) What is the Perspective of the Principle of Independence in the Use of Village Funds?

The objectives of this research are: 1) How are village funds used to realize independence in Murukan village? 2) How are village funds used for development in Murukan village? 3) What is the perspective of the principle of independence in the use of village funds?

The results of this research show that: 1) The use of village funds to implement independence in Murukan village, namely the lack of funding in Murukan village, where in 1 year you have to wait a long time for the APBN (State Revenue and Expenditure Budget) to come down. Limited capacity in managing funds. The village is increasingly densely populated by the people of Murukan village and the vacuum of BUMDesa where independence should be able to organize and manage or develop its finances is still not capable of managing finances independently as in the opinion of Kartini and Dali who say that, independence is the desire to do everything for oneself and Independence is the ability without interference from other parties. 2) The development of Murukan village has not been 100% evenly distributed due to the lack of village funds and still limited financial management of village funds, which, like roads and lighting, does not yet exist in every village, but in terms of other developments such as TPQ, the Murukan village Madrasah has been able to manage it in stages . 3) From the perspective of the Murukan village, the principle of independence in managing use practices and the village, there are still many village government officials, including the Murukan village head himself, who say that the lack of funding is hampering the village's independence in terms of development. In the sense that it still cannot be said to be independent, as explained in Law Number 6 of 2014, independence is a process carried out by the Village Government and village communities to carry out an activity in order to meet their needs with their own abilities, in the sense that Murukan village is not yet capable in terms of managing village use. in equitable development. Because being independent means being independent without the help of other parties, you can develop village fund finances, because original village income can be obtained through BUMDesa as regulated in Number 18 Article 72 paragraph 1 letter a Elucidation of Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014, which emphasizes that What is meant by "original Village income" is income originating from Village authority based on the origin rights and local scale authority of the Village. What is meant by "business results" also includes the results of Village BUMDesa and bent land.

خلاصة

على بناء القرية أموال استخدام في الاستقلال مبدأ منظور، NIM 126103202157، الفكري ديماس محمد، موروكان قرية دراسة) القرى بشأن 2014 لعام 6 رقم للقانون الثاني التعديل بشأن 2024 لعام 3 رقم القانون القانون دراسة برنامج القانونية والدراسات الشريعة كلية أطروحة، جومبانج مقاطعة، موجاونج منطقة د. المشرف 2024 أجونج تولونج الحكومية الإسلامية الله رحمة علي السيد جامعة الدستوري SH, MH, فريشا ديان

القرية أموال واستخدام الاستقلال حول منظور

2، رقم في القرى بشأن 2014 لعام 6 رقم القانون في الاستقلال منظور وجود هو البحث هذا وراء الدافع بها تقوم عملية وهي، الاستقلال على يؤكد والذي 2014 لعام 6 رقم القانون شرح من 9 الفقرة ب، الحرف يتم الخاصة بقدراتهم احتياجاتهم تلبية أجل من بنشاط للقيام المحلي المجتمع. القرية وحكومة القرية حكومة الاستقلال تنفيذ في أنه. القرى بشأن 2014 لعام 6 رقم القانون استقلال ط الرسالة 3 المادة في أيضاً تنظيمه به يشعر ما وهو، بالتساوي موزعة أو بعد مستقرة ليست فهي، التنمية أجل من القرية أموال استخدام في قرية كل تختلف حيث، القرية أموال إدارة حيث من محدودة قدرة وهو، موروكان بقرية المحيط المجتمع، لذلك ونتيجة. عام كل القرية سكان عدد زيادة من الرغم على، العام في واحدة مرة القرية أموال تنخفض ذلك موروكان قرية حكومة تكون أن ويجب، التمويل نقص بسبب بالتساوي والشوارع الطرق كل إنارة توزيع يتم لا القرية قانون. فرضه الذي للواقع وفقاً مستقلة إنها عنها يقال أن الممكن من يكن لم ولكن، تنفيذها في مستقلة، الاستقلال إلى الحاجة وبسبب. 2014 لسنة 6 رقم القانون من الأول الحرف 3 المادة، بالاستقلال المتعلق اليد قوة خلال من تحقيقها يمكن الرضاء من مستوى تحقيق آلية بأن القائلة النظرية طرح فقد، سميث لادم وفقاً السلوك" الاستقلال يشمل، لبرناديب ووفقاً سميث آدم ذكر كما، والذي، حكومي تدخل أي دون أي، الخفية الأشياء القيام على والقدرة، بالنفس والثقة، المشاكل/العقبات على التغلب على والقدرة، المبادرة أخذ على القادر في الرغبة هو الاستقلال إن يقولان اللذين ودالي كارتيني الرأي هذا ويعزز. الآخرين مساعدة دون بمفردها حكومة تكون أن يجب، الأخرى الأحزاب من تدخل دون القدرة هو والاستقلال الذات أجل من شيء بكل القيام في لأنه، موروكان الاستقلال لتنظيم الحكومة تدخل بدون لأنه مستقلة تكون أن على قادرة موروكان قرية مستقل بشكل الأموال تنفيذ يتم لم حيث القرية لصناديق المالية الإدارة في ارتباك هناك يزال لا المالية الإدارة يصوغ ولهذا. 2014 لعام 6 رقم القانون من الأول الحرف 3، المادة لولاية وفقاً العادلة التنمية في أدناه البحث في المؤلف:

2) موروكان؟ قرية في الاستقلال منظور من القرية أموال استخدام يتم كيف (1) هي البحث هذا في الصياغة في الاستقلال مبدأ منظور هو ما (3) موروكان؟ قرية في التنمية في القرية أموال استخدام يتم كيف القرية؟ أموال استخدام

يتم كيف (2) موروكان؟ قرية في الاستقلال لتحقيق القرية أموال استخدام يتم كيف (1) هي البحث هذا أهداف القرية؟ أموال استخدام في الاستقلال مبدأ منظور هو ما (3) موروكان قرية في للتنمية القرية أموال استخدام

التمويل نقص أي، موروكان قرية في الاستقلال لتنفيذ القرية أموال استخدام (1) يلي ما البحث هذا نتائج تظهر إيرادات) APBN على للحصول طويلة لفترة الانتظار واحد عام خلال عليك يتعين حيث، موروكان قرية في نحو على بالسكان مكتظة القرية، الأموال إدارة على المحدودة القدرة تنخفض (الميزانية) ونفقاتها الدولة تنظيم على قادراً الاستقلال يكون أن ينبغي حيث BUMDesa وفراغ، موروكان قرية مجتمع قبل من متزايد كارتيني ويرى. مستقل بشكل المالية الشؤون إدارة على قادر غير يزال لا المالية موارده تطوير أو وإدارة الأطراف من تدخل دون القدرة هو والاستقلال للذات شيء بكل القيام في الرغبة هو الاستقلال أن ودالي واستمرار القرية أموال نقص بسبب 100% بنسبة بالتساوي موروكان قرية تنمية توزيع يتم لم (2). الأخرى من ولكن، قرية كل في بعد توجد لا، والإضاءة الطرق مثل، والتي، القرية لأموال المالية الإدارة محدودة من (3) مراحل على إدارتها من موروكان قرية ومدرسة TPQ مثل التطوير مشاريع تمكنت أخرى ناحية من العديد هناك يزال لا، والقرية الاستخدام ممارسات إدارة في الاستقلال ومبدأ موروكان قرية نظر وجهة يعيق التمويل نقص إن يقولون الذين، نفسه موروكان قرية رئيس ذلك في بما، القرية في الحكوميين المسؤولين في موضح هو كما، مستقلة بأنها القول الممكن غير من يزال لا أنه بمعنى. التنمية شروط في القرية استقلال

من نشاط لتنفيذ القروية والمجتمعات القرية حكومة تنفيذها عملية هو الاستقلال فإن، 2014 لعام 6 رقم القانون القرية استخدام إدارة على بعد قادرة ليست مور وكان قرية أن بمعنى. الخاصة بقدراتهم احتياجاتهم تلبية أجل تطوير فيمكنك، أخرى أطراف مساعدة دون مستقلاً تكون أن يعني مستقلاً كونك لأن نظراً. العادلة التنمية في هو كما BUMDesa خلال من الأصلي القرية دخل على الحصول يمكن لأنه، القرية صندوق تمويل تعديل الثاني بشأن 2024 لسنة 3 رقم القانون توضيح أ الحرف 1 الفقرة 72 المادة 18 رقم في عليه منصوص من الناشئ الدخل هو "الأصلي القرية دخل" ب المقصود أن على يؤكد والذي، 2014 لسنة 6 رقم للقانون نتائج أيضاً يشمل "الأعمال نتائج" ب والمقصود. للقرية المحلية والسلطة الأصل حقوق على بناء القرية سلطة المنحبة والأرض بوم قرية.